



**PERJANJIAN KINERJA
DAN KOMITMEN PENGAWALAN AKUNTABILITAS KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif dan berorientasi hasil, serta pengawalan akuntabilitas keuangan dan pembangunan nasional/daerah, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Heli Restiati
Jabatan : Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur, dan Perdagangan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sally Salamah
Jabatan : Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja dan berkomitmen melaksanakan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) sesuai lampiran perjanjian ini. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja dan APP tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan pelaksanaan APP dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Ditandatangani secara elektronik
oleh

Sally Salamah
NIP. 19670420 198703 2 001

Jakarta, 20 Januari 2023

Pihak Pertama

Ditandatangani secara elektronik
oleh

Heli Restiati
NIP. 19680512 198903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023 TARGET SETAHUN

SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET	
				SATUAN	TOTAL
1		2		3	4
1	Meningkatnya dukungan fiskal BUMN (per Sektor BUMN) terhadap keuangan negara	1.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik	Badan Usaha	6,00
		1.2	Jumlah BUMN dengan Kinerja Sehat	BUMN	14,00
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional	2.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	Badan Usaha	9,00
		2.2	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Proyek Strategis Nasional (PSN)	18,00
3	Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha (per Sektor BUMN)	3.1	Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Badan Usaha	9,00
4	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN	4.1	Jumlah BUMN dengan tata kelola korporasi baik	BUMN	7,00
5	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	5.1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Badan Usaha	8,00
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/P/BU	6.1	Jumlah BUMN dengan MRI >= Level 3	BUMN	28,00
		6.2	Jumlah BUMN dengan Kapabilitas SPI >= Level 3	BUMN	8,00
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Akuntan Negara	7.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan	Indeks Skala 100	80,00
		7.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1,00
		7.3	Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan	Jumlah	1,00
8	Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Deputi Akuntan Negara	8.1	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern Unit Kerja (SPIP Unit Kerja)	(%) Persen	70,00
		8.2	Persentase Penyelesaian RTP(MRI Unit Kerja)	(%) Persen	100,00

Kegiatan	Anggaran	
1. Pengawasan Pembangunan	Rp	1.515.200.000,00
2. Dukungan Manajemen Internal	Rp	0,00
Jumlah	Rp	<u>1.515.200.000,00</u>

Jakarta, 20 Januari 2023

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Ditandatangani secara elektronik
oleh

Ditandatangani secara elektronik
oleh

Sally Salamah

Heli Restiati

NIP. 19670420 198703 2 001

NIP. 19680512 198903 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DIREKTORAT PENGAWASAN BADAN USAHA AGROBISNIS, INFRASTRUKTUR,
DAN PERDAGANGAN
AGENDA PRIORITAS PENGAWASAN

NO	KODE	LEVEL	SEKTOR/TEMA/ TOPIK PENGAWASAN	PERAN	TARGET PELAPORAN			
					TW I	TW II	TW III	TW IV
1	B.2.b	TOPIK	Infrastruktur Jalan Tol	Kontributor	-	✓	-	✓
2	B.2.c	TOPIK	Pembangunan Infrastruktur Kereta	Kontributor	-	✓	-	✓
3	B.4.a	TOPIK	Pembangunan dan Tata Kelola IKN	Kontributor	✓	✓	✓	✓
4	C.4.a	TOPIK	BUMN	Penanggung Jawab	-	✓	-	-
5	D.2.b	TOPIK	Akses Permodalan UMKM	Kontributor	✓	-	-	-
6	D.3.a	TOPIK	P3DN	Kontributor	✓	✓	✓	✓
7	D.3.c	TOPIK	Hilirisasi Industri	Kontributor	-	-	✓	-
8	E.1.b	TOPIK	Tata Kelola Program Bibit dan Benih Unggul	Kontributor	-	-	✓	-
9	E.1.d	TOPIK	Peningkatan Produksi Pakan Ternak	Kontributor	-	-	✓	-
10	E.2.a	TOPIK	Penanganan Pasca Panen	Kontributor	-	-	✓	-
11	E.2.b	TOPIK	Supply Chain Komoditas Pangan	Kontributor	-	-	✓	-
12	E.2.c	TOPIK	Kebijakan Stabilisasi Harga	Kontributor	-	-	✓	-
13	E.2.d	TOPIK	Kebijakan Ekspor/Impor Pangan	Kontributor	-	-	✓	-
14	E.3.a	TOPIK	Tata Kelola Cadangan Pangan Pemerintah Pusat	Kontributor	-	-	✓	-
15	E.3.e	TOPIK	Food Estate	Kontributor	-	✓	-	✓
16	E.3.f	TOPIK	Lumbung Ikan Nasional	Kontributor	-	✓	-	✓
17	F.5.a	TOPIK	Transisi Menuju Energi Baru Terbarukan	Kontributor	-	-	-	✓
18	G.1.g	TOPIK	Manajemen Risiko Badan Usaha	Kontributor	-	-	-	✓
19	G.2.d	TOPIK	Reforma Agraria	Kontributor	✓	-	-	-

Pihak Kedua

Ditandatangani secara elektronik
oleh

Sally Salamah
NIP. 19670420 198703 2 001

Jakarta, 20 Januari 2023

Pihak Pertama

Ditandatangani secara elektronik
oleh

Heli Restiati
NIP. 19680512 198903 2 001